**Mengapa periode 1945 – 1949 penting dan relevansinya untuk tantangan kebijakan luar negeri RI pada abad 21**:

1. Periode ini adalah periode di mana prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia terbentuk dan masih menjadi acuan pada saat ini. Karena itu pembahasan prinsip-prinsip dasar itu harus selalu dikaitkan dengan kondisi saat ini sehingga kebijakan luar negeri Indonesia memiliki acuan normatif yang jelas selain mempertimbangkan kondisi kekinian kepentingan nasional maupun politik global pada umumnya. Ada 4 prinsip dasar kebijakan luar negeri yang terbentuk pada periode ini[[1]](#footnote-1):
	1. **Prinsip anti-kolonialisme atau anti-penjajahan**

Prinsip ini lahir dari perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemederkaannya dan mendapat pengakuan dari dunia internasional khususnya Belanda yang akhirnya memberikan pengakuan melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Periode pasca tahun 1945 adalah awal dari proses dekolonisasi di Asia dan Afrika dan Indonesia menjadi bagian dari proses itu dan mendapatkan keuntungan dari dukungan kolektif dari sejumlah negara-negara yang baru merdeka dan menjadi cikal-bakal dari inisiatif Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok pada awal tahun 1960an. Tradisi kepemimpinan Indonesia di kalangan negara berkembang Asia-Afrika masih menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri serta diplomasi Indonesia saat ini meskipun tantangannya sudah jauh berbeda karena bangkitnya Tiongkok dan India dengan basis kekuatan material (ekonomi dan militer) yang jauh lebih kuat. Meskipun Indonesia tidak menjadi bagian dari BRICS yang merupakan gabungan kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan tradisional negara-negara Barat tetapi keanggotaan Indonesia di G20 sebagai salah satu wakil negara berkembang bisa dilihat sebagai manifestasi cita-cita historis untuk menjadi yang terkemuka di kalangan dunia berkembang. Romantika sejarah saja tidak cukup saat ini kepemimpinan lebih ditentukan oleh kekuatan material (*material capabilities*) ekonomi dan militer, sistem politik yang stabil dan berkelanjutan, penguasaan teknologi di era revolusi industri 4.0, kepemimpinan yang kuat, dan visi yang kuat menjadi negara maju.

* 1. **Prinsip “bebas aktif”**

Prinsip yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dalam pidatonya dengan judul “*Mendajung di antara Dua Karang*”tanggal 2 September 1948 di depan Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta. Akhir Perang Dunia Kedua menandai kekalahan ideologi Fascisme Jepang dan Nazisme Jerman sebagai musuh bersama AS dan Uni Soviet dan awal Perang Dingin berupa perebutan pengaruh antara kapitalisme Barat pimpinan AS dan komunisme pimpinan Uni Soviet. Indonesia tidak ingin larut dalam pertarungan itu dan memilih untuk menyatakan kebebasannya dalam menentukan pilihan kebijakannya sendiri. Itu tidak berarti bahwa Indonesia memilih untuk bersikap pasif tapi senantiasa aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Prinsip bebas aktif ini didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia yang dirumuskannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan dari luar baik AS maupun Uni Soviet. Prinsip bebas aktif ini tampaknya masih akan bertahan lama dalam perbendaharaan konsep atau norma dasar kebijakan luar negeri Indonesia pada masa yang akan datang karena terkait erat dengan natur keberadaan Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) serta tuntutan intrinsik yang melekat pada status *middlepowership* di Asia Tenggara yang dikelilingi oleh negara-negara besar masing-masing dengan kepentingan strategisnya terutama China dan AS. Dalam era persaingan global dan interdependensi saat ini makna prinsip bebas-aktif telah bergeser bukan lagi bebas dari persaingan ideologi kapitalisme dan komunisme karena perang dingin sudah lama berakhir tetapi penekanannya lebih pada kapasitas untuk bebas (*capacity to be free or to have a free choice*) dalam memilih kebijakan luar negeri terbaik untuk kepentingan nasional Indonesia dan kapasitas untuk aktif (*capacity to be active in a meaningful and effective way*) dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dipilih serta partisipasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Secara filosofis bebas artinya *release from internal and external constraints* yang tentu saja untuk Indonesia masih banyak di tengah persaingan global dan tuntutan rakyat yang semakin tinggi. Active engagement dalam hubungan internasional tidak hanya memerlukan (*volitional power or the power of the will*) tetapi juga *resources* yang untuk mendukung implementasi komitmen tersebut.

* 1. Prinsip **self-reliance** atau mengandalkan kekuatan sendiri atau kemandirian dalam berjuang

Prinsip ini bisa terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia pada waktu itu tidak mendapatkan kemerdekaannya sebagai hadiah atau pemberian dari Jepang tetapi merupakan hasil perjuangan kemerdekaan dengan pengorbanan luar biasa. Selain itu Indonesia juga berjuang mempertahankannya melalui jalur diplomasi dan kekuatan militer (meskipun terbatas peralatan militer yang dimiliki) sebagai reaksi atas aksi militer yang dilakukan oleh Belanda. Dalam konteks kekinian azas kemandirian terkait erat dengan martabat kita sebagai bangsa di mana dalam diplomasi internasional berlaku prinsip *there is no such thing as free lunch*. Prinsip transaksional dalam hubungan internasional merupakan praktik yang umum terjadi. Karena itu kemandirian selalu harus diupayakan dalam memperjuangan kepentingan nasional agar kita tidak menciptakan *self-imposed liabilities* (utang budi) dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Perlu dicatat bahwa dalam era perang dingin AS dan Uni Soviet giat membantu negara berkembang untuk memperluas *sphere of influence* sambil menuntut imbalan berupa dukungan dari negara-negara tersebut.

* 1. **Prinsip nasionalisme**

Karena kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bersama seluruh komponen bangsa yang berawal dari kebangkitan nasional tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 serta diteruskan dalam perjuangan menentang penjajah di seluruh daerah maka kebijakan luar negeri Indonesia selalu diabdikan untuk kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Konstituen utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia yang dipersatukan dalam NKRI. Kebijakan luar negeri bukanlah alat penguasa atau perjuangan kelompok tetapi perjuangan diplomasi yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selain itu untuk konteks kekinian nasionalisme harus diartikan secara luas di mana Indonesia terus meningkatkan daya saing bangsa, persatuan di tengah arus globalisasi, demokratisasi dan digitalisasi yang menggoyahkan sendi-sendi kebangsaan. Kemampuan Indonesia mengelola keragamannya dalam kerangka demokrasi modern merupakan modal dasar dalam kebijakan luar negeri sehingga menjadi *soft power* Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa.

1. **Kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 1950an dan Orde Lama 1959 – 1965**

Ada beberap hal penting dari kedua periode ini dalam memahami perjalanan diplomasi Indonesia yang membawa implikasi pada konteks kekinian diplomasi Indonesia.

* 1. Periode 1950an adalah periode Indonesia membangun basis keutuhan politik domestik untuk mendukung diplomasi di mana Indonesia dituntut untuk merealisasikan prinsip bebas aktif di tengah perebutan pengaruh yang semakin nyata antara AS dan Uni Soviet khususnya yang berkaitan dengan *containment policy* AS melalui *Mutual Security Act* (MSA) dengan negara mitranya.
	2. Indonesia mengambil inisiatif dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Catatan historis ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia karena KAA menghasilkan Dasa Sila Bandung yang dianggap sebagai perspektif khas Asia (negara berkembang) dalam hubungan internasional. Selain itu tradisi kepemimpinan Indonesia di kalangan negara berkembang terus dipelihara meskipun romantika sejarah harus dilengkapi dengan kekuatan nyata Indonesia sehingga menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Contoh itu telah ditunjukkan oleh Indonesia melalui pembangunan demokrasi yang relative stabil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya pada awal 1960an solidaritas negara-negara Asia-Afrika ini menjadi awal dari Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*) yang masih menjadi bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia.
	3. Di dalam negeri Indonesia menjalankan proses *state-building* melalui eksperimen demokrasi parlementer (liberal) yang berujung pada ketidakstabilan sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang menandai periode Demokrasi Terpimpin dan awal proses radikalisasi kebijakan luar negeri RI yang condong ke kubu Uni Soviet (komunisme).
	4. Radikalisasi kebijakan luar negeri Indonesia melalui proyek anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme Soekarno berujung pada konfrontasi dengan Malaysia (Kampanye “Ganyang Malaysia”) di mana Soekarno menuduh pembentukan negara federal Malaysia merupakan proyek imperialisme Inggris (Barat) dan karena itu harus ditentang menurut Soekarno.
	5. Karena radikalisasi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Soekarno di mana Indonesia lebih condong ke arah kubu komunisme Uni Soviet, maka Indonesia dianggap tidak konsisten menjalankan prinsip bebas aktif. Kenyataan ini menjadi contoh bahwa orientasi ideologis dan kepentingan politik penguasa dapat memengaruhi konsistensi Indonesia menjalankan prinsip bebas aktif. Kenyataan ini penting untuk diketahui karena erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan dalam kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam era awal 1960an ini sangat kental dengan warna ideologis dan dominasi pribadi Presiden Soekarno.
	6. Periode 1950an dan 1960an Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar sebagai dampak dari Perang Dingin dan negara-negara di kawasan ini memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda-beda padahal sebagai negara baru merdeka mereka membutuhkan stabilitas dan keamanan regional. Latar belakang historis ini menciptakan urgensi pembentukan ASEAN pada tahun 1967 sebagai wujud keinginan bersama lima pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand yang saat ini telah menjadi *rule-based organization* dan menjadi platform regional kebijakan luar negeri Indonesia mengingat pertarungan kepentingan negara-negara besar masih berlangsung dan membawa dampak terhadap stabilitas dan keamanan regional di Asia Tenggara.
1. Rizal Sukma (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey,* Volume 35 No. 3 (March 1995). p. 306. [↑](#footnote-ref-1)